



Judul : Jamin ketersediaan air bersih, Badan Legislasi DPR siapkan RUU PAMDS
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Jamin Ketersediaan Air Bersih Badan Legislasi DPR Siapkan RUU PAMDS

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Aria Bima berharap RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMDS) mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Regulasi itu mesti menjamin ketersediaan air bersih serta fasilitas sanitasi layak secara merata untuk seluruh warga di Indonesia.

Aria mengatakan, pengaturan air minum dan sanitasi makin mendesak karena berkaitan langsung dengan ketahanan kesehatan masyarakat. Karena itu, tata kelola sumber daya air harus diintegrasikan secara menyeluruh dengan standar sanitasi nasional. Itu demi memastikan pelayanan publik itu terus berjalan lancar dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

Aria mengapresiasi penyusunan RUU yang menggunakan basis data komprehensif serta masukan berbagai pihak, termasuk analisis sentimen medsos dan telesurvei. "Penguatan implementasi perlu jadi fokus utama agar aturan yang dirumuskan tidak hanya sebatas dokumen formal belaka tanpa eksekusi nyata," ujarnya, Selasa (25/8/2026).

Dia bilang, basis data yang disajikan sudah sangat kuat untuk mendukung rancangan regulasi itu. Namun, keberhasilan implementasi politik ke depan tetap memerlukan penajaman dari sisi praktis. Agar, peraturan tidak terhenti sebagai dokumen semata dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

Selanjutnya, kata Aria, aspek infrastruktur harus jadi perhatian utama, karena berkaitan erat dengan keadilan sosial dalam penyediaan layanan publik. Kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah miskin terpinggirkan mesti diprioritaskan, karena mereka masih menghadapi keterbatasan akses air bersih.

Negara tidak boleh membiarkan warga di perbatasan maupun kawasan miskin terluar hanya jadi penonton kemajuan pembangunan nasional. "Pemenuhan hak dasar atas air minum dan sanitasi yang layak wajib dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa ada satu pun wilayah yang terabaikan," tegasnya.

RUU ini, lanjut Aria, perlu memberikan mandat yang tegas kepada Pemda untuk memastikan ketersediaan layanan air minum, termasuk di wilayah pelosok, terluar, dan miskin. Regulasi ini perlu mengatasi ketimpangan layanan yang selama ini masih terjadi di berbagai daerah secara efektif dan menyeluruh.

Dia bilang, beleid ini jangan sampai hanya dirasakan kawasan yang sejak awal telah memiliki infrastruktur memadai atau berkecukupan. "Regulasi ini perlu menyelesaikan persoalan ketidakadilan serta ketimpangan distribusi fasilitas air secara nyata di lapangan," katanya.

Selain pemerataan akses, kualitas air juga mesti dijaga ketat, menyusul maraknya keluhan warga soal pasokan kotor, berbau, dan sering terhenti. ■ PYB